

**ANALISIS LAPORAN KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN PADA  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA)  
KABUPATEN ASAHAN**

Oleh :

**DIAN ISLAMIATI BR. SIAGIAN**

**NIM 0502172320**

**Program Studi**

**AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**ANALISIS LAPORAN KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN PADA  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA)  
KABUPATEN ASAHAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)  
Pada Program Studi Akuntansi Syariah**

**Oleh:**

**DIAN ISLAMIATI BR. SIAGIAN**

**NIM 0502172320**

**Program Studi**

**AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Islamiati Br. Siagian  
Nim : 0502172320  
Tempat/Tgl Lahir : Sentang, 5 Februari 1999  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Jeruk I k.III Kelurahan Sentang, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS LAPORAN KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) KABUPATEN ASAHAN" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



**Dian Islamiati Br. Siagian**  
Nim. 0502172320

## SURAT PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS LAPORAN KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) KABUPATEN ASAHAN” an. Dian Islamiati Br. Siagian, NIM 0502172320 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 31 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 31 Agustus 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Akuntansi Syariah  
UIN-SU Medan

Ketua,



(Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nst, MA)  
NIDN. 2001077903

Sekretaris,



(Hendra Hermain, SE., M.Pd)  
NIDN. 2010057302

1.



(Dr. Kamilah, SE. Ak, M.Si, CA)  
NIDN. 2023107901

Anggota

2.



(Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, M.Ak)  
NIDN. 2011078902

3.



(Hendra Hermain, SE., M.Pd)  
NIDN. 2010057302

4.



(Laylan Syafina, M.Si)  
NIDN. 2027089103

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN-SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIDN. 202230476

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS LAPORAN KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN PADA  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA)  
KABUPATEN ASAHAN**

Oleh:

**DIAN ISLAMIATI BR. SIAGIAN**

NIM: 0502172320

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Akuntansi (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syari'ah

Medan, 2 Juni 2021

Pembimbing I

Dr. Kamilah, SE. Ak, M.Si, CA

NIDN. 2023107901

Pembimbing II

Nur Fadhilah Ahmad Hsb, M.Ak

NIB. 1100000036

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syari'ah

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA

NIDN.2001077903

## ABSTRAK

**Skripsi berjudul “Analisis Laporan Kinerja Anggaran Pendapatan Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan” atas nama Dian Islamiati Br. Siagian. Di bawah bimbingan Pembimbing I Ibu Dr. Kamilah, SE. Ak, M.Si, CA dan Pembimbing II Ibu Nur Fadhillah Ahmad Hsb, M.Ak.**

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan merupakan lembaga yang berperan dalam proses pengelolaan pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai Kinerja Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan selama periode 2016-2019. Kinerja anggaran tersebut dapat disimpulkan secara efektif setelah melewati serangkaian kriteria berdasarkan analisis dan rasio yang digunakan dalam penelitian. Adapun pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa laporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang berdasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan teknik analisis data yaitu berupa hasil analisis kinerja anggaran pendapatan daerah yang diproses menggunakan Analisis Varians Pendapatan, Analisis Pertumbuhan Pendapatan, dan Analisis Rasio Keuangan. Berdasarkan hasil Analisis Varians Pendapatan pada tahun 2016 sebesar 107,44%, pada tahun 2017 sebesar 97,08%, pada tahun 2018 sebesar 98,12%, dan pada tahun 2019 sebesar 95,04%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kurang baik karena secara umum realisasi belum mencapai 100% dari target anggarannya. Hasil Analisis Pertumbuhan Pendapatan pada tahun 2016 sebesar 7,40%, tahun 2017 sebesar 8,31%, tahun 2018 sebesar 8,84%, dan di tahun 2019 sebesar 8,68%. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah baik dalam mengelola pertumbuhannya karena sebagian besar hasil analisis bernilai positif dengan nilai maksimal di tahun 2016 sebesar 14,76%, dan minimal di tahun 2017 sebesar -7,9%. Hasil Analisis Rasio yang terdiri dari Derajat Desentralisasi menunjukkan pada tahun 2016 hasil sebesar 7,40%, pada tahun 2017 sebesar 8,31%, pada tahun 2018 sebesar 8,84% dan di tahun 2019 sebesar 8,68%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang tidak diharapkan karena hasilnya di bawah 20% dengan kriteria kemampuan daerah sangat kurang. Analisis Rasio Kemandirian menunjukkan bahwa rasio tahun 2016 sebesar 11,41%, pada tahun 2017 sebesar 9,67%, pada tahun 2018 sebesar 10,97%, dan pada tahun 2019 sebesar 12,5%. Secara umum berdasarkan kriteria kemampuan, rasio kemandirian daerah masih rendah sekali. Pada analisis Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2016 sebesar 113,90%, tahun 2017 sebesar 95,42%, tahun 2018 sebesar 95,62%, dan di tahun 2019 sebesar 89,18%. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria kemampuan secara umum efektif karena sebagian besar hasil masih pada persentase 90-100%.

**Kata Kunci:** Anggaran Pendapatan, Analisis Varians, Pertumbuhan, Rasio Keuangan.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.” Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabat beliau dan para pengikut mereka sampai hari akhir. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.H.I, M.A, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Hendra Hermain M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Kamilah S.E. Ak. M.Si, selaku Pembimbing I yang dengan sabar mengorbankan waktunya dan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan M.Ak, selaku Pembimbing II yang begitu banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan hingga selesai, serta seluruh staff pegawai yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

8. Bapak Bambang yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama melakukan penelitian di kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan. Serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua yang selalu menjadi penopangku. Terimakasih tak terhinggaku untukmu, Ibuku tersayang dan juga untukmu Ayahku yang selalu menjadi pahlawan dalam hidupku. Terimakasih untuk sujud dan segala do'a dan kasih sayang yang tulus hingga mampu menghantarkan ananda meraih gelar ini.
10. Abangda fachry Rasyid Siagian, abangda Fadhly Zulkarnain Siagian dan kakak tersayang Dita Evikarati Siagian yang telah memberi do'a dan semangat sehingga mencapai semua ini. Dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
11. Teman satu tempat tinggal dan terbaik yaitu Inda Ayu, Citra Triana, Diva Yusra Nst, Khairunnisa Aprilia, dan Unde Wardah, terimakasih untuk kenangan kita, perjuangan kita tiada hentinya untuk selalu memberi arahan dan selalu mengingatkan saya dalam hal apapun.
12. Sahabat-sahabat terbaikku yang juga sedang berjuang bersama untuk meraih gelar Silmi Kaffah, Syafinaz Diandra, Dinda Nabila Srt terimakasih atas saling supportnya untuk meraih semua ini.
13. Teman-teman baikku yang juga berjuang bersama sepertiku Ananda Triana, Rani Anggraini, Hastia Simanjuntak, Anisa Adawiyah, Miftahu Najiha, Rifqa Meuthia, Sintia Anjani, Karnila, Ade Try, yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi, terimakasih atas kenang-kenangan masa kuliah yang tak akan terlupakan yang telah kita ciptakan.
14. Teman seperjuangan Akuntansi Syari'ah khususnya kelas D-2017, seluruh rekan saya di HMJ Akuntansi Syari'ah dan teman KKN kelompok 17 Desa Perduhapan, Pakpak Bharat yang luar biasa saling memberi motivasi dan nasehat serta dukungan.
15. Kakak dan abang senior terutama kak Fia yang telah memberi arahan dan membagi pengalaman dalam penyusunan skripsi.

16. Dan yang terakhir seluruh staff Perpustakaan, baik perpustakaan FEBI dan perpustakaan lainnya, yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan, motivasi, dukugan dan pengarahan yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis yang mengakui bahwa skripsi yang penulis susun ini sangatlah jah dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, sehingga berguna bagi kemajuan penulis dan bagi kita semua pada umumnya. Demikianlah skripsi ini disusun semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan.

Medan,24 Agustus 2021

Penulis,

Dian Islamiati Br. Siagian

Nim. 0502172320

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>PERSETUJUAN. ....</b>	<b>.....</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK. ....</b>	<b>.....i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>.....ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>..... v</b>
<b>DAFTAR TABEL. ....</b>	<b>.....vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>.....viii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN.....</b>	<b>..... 1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah. ....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah. ....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II       LANDASAN TEORI.....</b>	<b>..... 8</b>
A. Kajian Teoritis.....	8
1 Akuntansi Sektor Publik.....	8
2 Anggaran Sektor Publik. ....	9
3 Keuangan Daerah .....	11
4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ....	12
5 Anggaran Pendapatan Daerah. ....	14
6 Anggaran Bebas Kinerja.....	16
7 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
B. Kajian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	30

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
	A. Pendekatan Penelitian. ....	32
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
	C. Subjek dan Objek Penelitian. ....	33
	D. Jenis dan Sumber Data. ....	33
	E. Teknik Pengumpulan Data. ....	33
	F. Analisis Data. ....	34
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. ....</b>	<b>38</b>
	A. Gambaran Umum dan Tempat Penelitian. ....	38
	B. Hasil Penelitian. ....	44
	C. Pembahasan. ....	51
	1. Analisis Varians Pendapatan Daerah. ....	51
	2. Analisis Pertumbuhan Pendapata Daerah. ....	52
	3. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah. ....	53
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran.....	58
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
	<b>LAMPIRAN.....</b>	

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Anggaran dan Realisasi BAPPENDA Kabupaten Asahan .....	4
2.1 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah .....	20
2.2 Persentase Kinerja Efektivitas .....	21
3.1 Waktu Penelitian.....	32
4.1 Perhitungan Varians Pendapatan Daerah Kab Asahan 2016-2019.....	44
4.2.1 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab Asahan 2016. ....	45
4.2.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab Asahan 2017. ....	46
4.2.3 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab Asahan 2018. ....	47
4.2.4 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab Asahan 2019. ....	47
4.3 Rasio Keuangan Derajat Desentralisasi.....	48
4.4 Rasio Keuangan Kemandirian Daerah.....	49
4.5 Rasio Keuangan Efektivitas PAD.....	50

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
4.1 Struktur Organisasi BAPPENDA Asahan .....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya.<sup>1</sup>

Anggaran berbasis Kinerja (*performance Based budgeting*) merupakan pengganti sistem penganggaran lama yaitu sistem *line item Budgeting* yang menitik beratkan kepada *input* bukan *output* yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang diterapkan secara nasional. Anggaran berbasis kinerja diterapkan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penganggaran belanja publik.<sup>2</sup>

Tujuan Anggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga seluruh anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat luas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 239.

<sup>2</sup> Bambang Sancoko, et. Al. *Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008), h.42.

<sup>3</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik : Pengelolaam Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, ed. 3, 2007), h.37

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lebih lanjut memperjelas bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta pengelola bendahara umum negara/daerah. Sehubungan itu, pemerintah pusat maupun setiap pemerintah daerah perlu menyelenggarakan akuntansi dalam suatu sistem yang pedomannya ditetapkan oleh menteri keuangan untuk lingkungan pemerintah pusat dan menteri dalam negeri untuk lingkungan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan kegiatan akuntansi mulai dari satuan kerja pengguna anggaran, penyusun laporan keuangan oleh entitas pelaporan dan penyajian kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit, hingga penyampaian rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Namun, segala hal yang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh legislatif atau penggunaan laporan tersebut oleh pihak-pihak terkait tidak cukup pengaturannya dalam peraturan pemerintah ini.<sup>4</sup>

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Melalui Laporan Realisasi Anggaran, analisis pendapatan daerah dapat dilakukan

---

<sup>4</sup> Ardon Fridolin Honga, dkk. "Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung" dalam Jurnal EMBA vol.2 No.4 Desember 2014.

dengan cara menghitung Analisis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan, menghitung Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan menghitung rasio keuangan.<sup>5</sup>

Kabupaten Asahan adalah salah satu pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah. Menilai kinerja anggaran pemerintah daerah dapat dilihat dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Pemerintah Kabupaten Asahan dilihat dari laporan anggaran dan realisasi BAPPENDA Asahan di tahun 2017 mengalami penurunan pendapatan hal ini dikarenakan realisasi penerimaan retribusi daerah kabupaten Asahan 2017 sebesar 65,25% . Pencapaian itu lebih rendah atau menurun 8,85% jika dibandingkan dengan pencapaian pada 2016. Penurunan itu disebabkan dihapuskannya pengutipan retribusi izin gangguan (HO) dan pengutipan retribusi terminal oleh daerah.<sup>6</sup> Kemudian di tahun 2018 anggaran pendapatan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 98,12%. Terakhir pada anggaran pendapatan di tahun 2019 mengalami penurunan persentase pendapatan dari target anggaran hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Asahan mengalami defisit keuangan akibat tidak tercapainya target sejumlah pos penerimaan pendapatan tahun 2019. Defisit keuangan ini terjadi akibat tidak tercapainya target penerimaan pendapatan dari penerimaan pajak bagi hasil dari pemerintah pusat, penerimaan pajak bagi

---

<sup>5</sup> Komariyah, "Analisis Rasio Keuangan pada Anggaran dan Belanja Daerah untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kab Magelang" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

<sup>6</sup> *Topinformasi.com* tahun 2018

hasil provinsi, dan pendapatan asli daerah (PAD).<sup>7</sup> Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2018. Persentase kenaikan target pajak daerah pada tahun 2019 adalah 10,98% bila dibandingkan dengan target tahun 2018<sup>8</sup>. Pada pos pendapatan pajak daerah tidak tercapainya realisasi dari target yang telah dianggarkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan serta adanya jenis pajak yang sifatnya insidentil.<sup>9</sup> Hal ini didukung oleh data tabel 1.1 mengenai target anggaran dan realisasi pendapatan daerah kabupaten Asahan sebagai berikut:

**Tabel : 1.1**

**Anggaran dan Realisasi BAPPENDA Kabupaten Asahan**

<b>Tahun</b>	<b>Target APBD (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>(%)</b>
2016	1,502,930,028,344.80	1,614,734,437,069.48	107.44
2017	1,532,579,693,523.10	1,487.824,513,722.59	97.08
2018	1,646,804,154,010.29	1,615,917,027,263.00	98.12
2019	1,814,345,640,848.37	1,724,265,273,792.65	95.04

Pada tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2016 persentase anggaran mencapai 107,44%. Kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan yang persentasenya hanya mencapai 97,08% dan di tahun 2018 persentase meningkat kembali sebesar 98,12%. Terakhir di tahun 2019 mengalami penurunan kembali persentase sebesar 95,04%.

Berdasarkan data target APBD dan realisasinya yang diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dalam pengelolaan anggaran target APBD dan realisasi anggarannya selama tahun 2016-2019 ditemukan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan target anggaran APBD selama tahun 2016-2019 terus meningkat tetapi tidak searah dengan realisasi pendapatannya. Kemudian untuk di tahun 2017-2019 anggaran ditemukan tidak mencapai target. Hal ini berbanding

<sup>7</sup> Sumber, [www.Gatra.com](http://www.Gatra.com) . tahun 2019

<sup>8</sup> [Bappenda.asahankab.go.id](http://Bappenda.asahankab.go.id) tahun 2019

<sup>9</sup> <https://asahankab.go.id> tahun 2020

terbalik dengan teori yang mengatakan bahwa kinerja anggaran pendapatan dikatakan baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang di anggarakan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal ini dinilai kurang baik<sup>10</sup>. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan dan harus diperoleh oleh pemerintah daerah<sup>11</sup>. Permasalahan inilah yang terjadi di BAPPENDA Asahan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis target APBD dan realisasinya. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “**ANALISIS LAPORAN KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) KABUPATEN ASAHAN**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Mengalami penurunan pendapatan hal ini dikarenakan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Asahan 2017 sebesar 65,25% . Pencapaian itu lebih rendah atau menurun 8,85% jika dibandingkan dengan pencapaian pada 2016.
2. Pada tahun 2019 mengalami penurunan persentase pendapatan dari target anggaran, hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Asahan mengalami defisit keuangan akibat tidak tercapainya target sejumlah pos penerimaan pendapatan tahun 2019.
3. Persentase kenaikan target pajak daerah pada tahun 2019 adalah 10,98% bila dibandingkan dengan target tahun 2018. Untuk pos pendapatan pajak daerah tidak tercapainya realisasi dari target yang telah dianggarkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk

---

<sup>10</sup> Abdul Halim. *Akuntansi Sektor Publik , Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2010)

<sup>11</sup> Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. h,136

membayar pajak yang telah ditetapkan serta adanya jenis pajak yang sifatnya insidental.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka perlu diadakan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus pada analisis varians pendapatan daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah dan analisis rasio keuangan yang terdiri atas derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD yang di dapat dari data laporan keuangan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka dalam hal ini peneliti membuat rumusan permasalahan adalah:

1. Bagaimana analisis varians Anggaran Pendapatan pada BAPPENDA Kabupaten Asahan periode 2016-2019?
2. Bagaimana analisis pertumbuhan Anggaran Pendapatan pada BAPPENDA Kabupaten Asahan periode 2016-2019?
3. Bagaimana analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan pada BAPPENDA Kabupaten Asahan periode 2016-2019?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui analisis varians Anggaran Pendapatan pada BAPPENDA Kabupaten Asahan periode 2016-2019.
2. Mengetahui analisis pertumbuhan Anggaran Pendapatan pada BAPPENDA Kabupaten Asahan periode 2016-2019.
3. Mengetahui analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan pada BAPPENDA Kabupaten Asahan periode 2016-2019.

## **F. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

#### a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Anggaran Daerah di masa yang akan datang.

#### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang kinerja anggaran dan juga laporan realisasi anggaran pendapatan daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

#### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini.

#### d. Bagi Peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Akuntansi Sektor Publik

Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.<sup>12</sup>

Organisasi sektor publik sering diartikan sebagai organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba (profit) sebagai tujuan akhirnya. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik. Kegiatan perencanaan, pengendalian biaya dan kegiatan serta evaluasi dan pengendalian tetap dijalankan di organisasi sektor publik seperti halnya di sektor swasta. Istilah sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan sektor swasta.

Dengan demikian, ada beberapa alasan mengapa sektor publik diperlukan, yaitu:

1. Sektor publik berfungsi untuk menyediakan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tidak disediakan oleh privat maupun sektor sosial.
2. Sektor publik diperlukan sebagai regulator.

---

<sup>12</sup> Nordiawan Deddi. *Ayuningtyas, Akuntansi Sektor Publik Edisi 2* (Jakarta : Salemba Empat, 2010), h. 125.

3. Sektor publik diperlukan sebagai pengelola negara dan pengemban amanah konstitusi melalui fungsi birokrasi pemerintahan.<sup>13</sup>

## 2. Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit (satuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran sektor publik merupakan perencanaan manajerial untuk tindakan yang dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan. Anggaran sektor publik merupakan rencana jangka pendek yang komprehensif, yang membuat tujuan dan target manajemen dilaksanakan. Anggaran sektor publik adalah alat manajerial yang memastikan pencapaian target organisasional dan memberikan pedoman yang rinci untuk operasi setiap harinya.<sup>14</sup>

Ada beberapa prinsip dasar anggaran sektor publik yaitu:

- a. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

- b. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non-budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

- c. Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

---

<sup>13</sup> Arfan Ikhsan, dkk. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi* (Medan : Madenatera. 2018), h.2-3

<sup>14</sup> *Ibid* h.54

d. *Nondiscretionary appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisiensi dan efektif

e. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitanunan.

f. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* dan *overestimate* pengeluaran.

g. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.

h. Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.<sup>15</sup>

Prinsip dasar anggaran sektor publik di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara' ayat 181-184, sebagai berikut:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
 مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾ ﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu mengurangi hak-haknya dan

<sup>15</sup> Haryanto, *perencanaan dan penganggaran*, h. 81.

*janganlah membuat kerusakan di bumi, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat terdahulu”.*<sup>16</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa prinsip dari anggaran sektor publik haruslah bersifat seimbang dan tidak mengurangi hak-hak masyarakat. Anggaran yang telah disusun harus diumumkan dan dilaporkan secara jelas dihadapan umum, karena anggaran bukan hanya demi kepentingan pribadi atau segolongan orang tetapi juga kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran harus dikaitkan secara hukum, sehingga punya konsekuensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **3. Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah yaitu proses peidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau yang juga sering disebut dengan pengurusan bendaharawan.

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya baik di sektor publik maupun di suatu perusahaan yang mana kinerja ini sangat penting dalam berbagai kegiatan apapun.

---

<sup>16</sup> Q.S Asy-Syu'ara': 181-184

Tujuan pengukuran kinerja sektor publik yaitu memperbaiki kehidupan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan terbaik yang hal itu seringkali sulit diukur dengan ukuran finansial. Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat.<sup>17</sup>

#### **4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.<sup>18</sup>

Menurut Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD.

---

<sup>17</sup> Elfreda Aplonia Ramadani, Rani Febria dan Lau, 'Analisis Kinerja Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2010-2014', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2015), 1689–99.

<sup>18</sup> Nurlan Darise. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. (Jakarta : Indeks. 2010) h.133

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fungsi APBD adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk meneliti apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

f. Fungsi Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Presiden Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*

## 5. Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah<sup>20</sup>. Pendapatan Daerah digolongkan menjadi tiga :

### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dengan sumber-sumber pemungutan terdiri dari:

#### 1) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>21</sup> Pajak daerah sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yuridiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya.<sup>22</sup>

#### 2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan

---

<sup>20</sup>Abdul Halim. *Akuntansi Sektor Publik , Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2010) h. 99

<sup>21</sup> Nurlan Darise. *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta : Indeks. 2009) h.43.

<sup>22</sup> M.I.P Nasution, N. Nurbaiti, N. Nurlaila, T.I.F Rahmah and K.Kamilah “Kontibusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah,” 2020 3<sup>rd</sup> International conference on computer and informatis engineering (IC2IE), 2020,pp. 48-51, doi: 10.1109/IC2IE50715.2020.9274654

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### 4) Lain-lain Pendapat Asli Daerah yang Sah

Jenis Lain-lain Pendapat Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

### 1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Dana bagi hasil bersumber dari pajak yaitu : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25, pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. Dana bagi hasil sumber daya alam yaitu : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

## 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berfungsi sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAU suatu daerah dapat ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

## 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar.

### c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah mencakup : hibah/bantuan dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggungan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari teknis kepada kabupaten/kota, dan penyesuaian, bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya.<sup>23</sup>

## 6. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis Kinerja (*performance Based budgeting*) merupakan pengganti sistem penganggaran lama yaitu sistem *line Item Budgeting* yang menitik beratkan kepada *input* bukan *output* yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang diterapkan secara nasional. Anggaran berbasis kinerja diterapkan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penganggaran belanja publik.<sup>24</sup>

Pasal 7 ayat (1) PP 21 tahun 2004 menyebutkan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h.43.

<sup>24</sup> Bambang Sancoko, et. Al. *Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008), h.42.

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diterapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Anggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga seluruh anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas.<sup>25</sup>

## **7. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan tiga bagian yaitu :

### **a. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah**

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dapat terlihat dari realisasi pendapatan dan anggaran. Apabila realisasi melebihi anggaran yang telah dibuat maka kinerja pemerintah daerah dinilai baik. Berdasarkan realisasi anggaran, dapat dilakukan Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dengan cara :

#### **1) Analisis Varians Pendapatan Daerah**

Analisis varians pendapatan daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu penggunaan laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja keuangan pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus

---

<sup>25</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik : Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, ed. 3, 2007), h.37

diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).

Berikut ini rumus untuk menghitung Analisis Varians:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%^{26}$$

## 2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan

---

<sup>26</sup> Mahmudi . *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* . h .136

sebagainya. Berikut rumus untuk Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah :

Analisis Pendapatan Tahun t:

$$\frac{\text{Pend.Tahun } t - \text{Pend.Tahun } (t-1)}{\text{Pend.Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

### 3) Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

Adapun keuangan daerah terdiri atas:

#### a) Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut ini rumus untuk menghitung derajat desentralisasi:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%^{27}$$

#### b) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio Kemandirian dihitung dengan cara perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan pemerintah pusat atau Provinsi dan Pinjaman. Kemandirian keuangan suatu daerah dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan kemampuan para pengelolanya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 165 sebagai berikut.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* h, 142

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
 دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ  
 رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksa-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi Maha penyayang.”<sup>28</sup>

Berikut ini rumus menghitung Rasio Kemandirian :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}}$$

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat ditampilkan dalam Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.<sup>29</sup>

**Tabel 2.1 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah:**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Rendah Sekali
Rendah	>25-50	Rendah

<sup>28</sup> Qs. Al-‘anam :165

<sup>29</sup> Arthaingan H.Mutiha. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014” dalam Jurnal Vokasi Indonesia vol.4 No.2Juli- Desember 2016.

Sedang	>50-75	Sedang
Tinggi	>75-100	Tinggi

c) Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut di katakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program ataupun kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah rasio efektivitas. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan targetnya.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar satu atau seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

**Tabel 2.2 Persentase Kinerja Efektivitas:**

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

## B. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti berkaitan dengan kinerja anggaran pendapatan adalah sebagai berikut:

No	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil
1.	Bahrn Assidiqi (2014).	Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Pemkab Klaten dilihat dari Varians Pendapatan Daerah Pemkab Klaten selama Tahun 2008-2012, secara umum dapat dikatakan baik. Dan dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemkab Klaten, secara umum mengalami peningkatan Kinerja Keuangan Pendapatan. Selanjutnya dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Pemkab Klaten dikatakan rendah. Sedangkan pada hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemkab Klaten selama Tahun 2008-2012 secara umum dikatakan baik. Dan dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah Pemkab Klaten selama Tahun 2008-2012, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Selanjutnya, dilihat dari keserasian Belanja Daerah secara

			<p>umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Sedangkan dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah, realisasi anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Klaten tidak terdapat angka melebihi anggaran Belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan efisiensi belanja. Perbedaan mencolok penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada penelitian ini mengukur Kinerja Keuangan Anggaran dan Kinerja Keuangan Belanja Daerah sedangkan di penelitian sekarang hanya mengukur pada Kinerja Anggaran Pendapatan Daerah. Perbedaan yang lain adalah lokasi penelitian yang mengambil Kabupaten Klaten, sedangkan untuk penelitian yang sekarang mengambil Kabupaten Asahan.<sup>30</sup></p>
2.	Rani Febri	"Analisis Kinerja	Hasil penelitian ini

<sup>30</sup> Kabupaten Klaten Tahun, *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabuapten Klaten Tahun 2008-2012*, 2014.

	<p>Ramadani, Elfreda Aplonia Lau, Suyatin.</p>	<p>Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Periode 2010-2014”</p>	<p>menunjukkan Kinerja Keuangan Pendapatan daerah dilihat dari Varians Pendapatan Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014 secara umum dapat dikatakan kurang baik, dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan mengalami fluktuasi (naik turun), dilihat dari Derajat Desentralisasinya kurang baik, dilihat dari Kemandiriannya dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka hipotesis ditolak. Sedangkan dalam Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dilihat dari Efektivitas PAD Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum dikatakan efektif, dilihat dari variansnya dikatakan kurang baik, dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif, dilihat dari Keserasian Belanja Daerahnya terlihat bahwa sebagian kecil dana belanja</p>
--	--	--	--

			<p>daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar 66,17, maka hipotesis ditolak, dilihat dari Keserasian Belanja Daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana dan belanja daerah dialokasikan Untuk Belanja modal, hipotesisnya ditolak, dan dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah, realisasi anggaran Belanja Pemerintah tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan efisiensi. Perbedaan mencolok penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini mengukur Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan pada Kinerja Anggaran target APBD dan Realisasi Anggaran pendapatannya. Di penelitian ini juga hanya meneliti bagian Anggaran dan Realisasi PAD saja, sedangkan pada penelitian sekarang meneliti pada target</p>
--	--	--	--

			PAD dan Non PAD atau seluruh pendapatannya. <sup>31</sup>
3.	Ardon Frdolin Honga, Ventje Ilat (2014).	”Analisis Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung Periode 2013”	Hasil penelitian ini menunjukkan Realisasi Kinerja pendapatan daerah kota Bitung dilihat dari sisi pendapatan dengan menggunakan analisis varian tahun 2013 secara umum dapat dikatakan baik, sedangkan dilihatkanndari analisis varians secara umum dapat dikatakan baik karena realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Dan realisasi selama tahun 2013 berlangsung secara efektif dengan memberikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terdapat perbedaan penelitian ini yakni tahun yang dianalisis anggarannya hanya satu tahun, sedngkan penelitian sekarang menganalisis realisasi anggaran selama 4 tahun. <sup>32</sup>

<sup>31</sup> Rani Febri, dkk. “Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda” dalam Jurnal (Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)

<sup>32</sup> Ardon Fridolin Honga, dkk. “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung” dalam Jurnal EMBA vol.2 No.4 Desember 2014.

4.	Arthaingan H. Mutiha (2016)	“Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota bogor tahun 2010-2014”	Pola hubungan kemandirian daerah menunjukkan bahwa hasil dari hubungan konsultatif, pencapaian rasio kemandirian relative rendah sedikit di atas pola hubungan instruktif. Kemudian Efektivitas keuangan cukup baik atau efektif. Selanjutnya Pada porsi belanja tidak langsung (BTKL) terhadap total pendapatan relative lebih besar dari porsi belanja langsungnya. <sup>33</sup>
5.	D. kartika, IC. Kusuma (2015)	“Analisis rasio kemandirian,efektivitas dan Efisiensi PAD pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sukabumi”	Kemandirian kabupaten Sukabumi tahun 2009-2013 tergolong sangat rendah, berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif sebesar 105,67%, berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien sebesar 5,02% <sup>34</sup>
6.	Nathania Ch. E. Sasuwuk, Jullie J. Sondakh, Jessy D. L.	“Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	APBD dilihat menggunakan analisis varians tahun 2011-2015 dikatakan baik, menggunakan analisis rasio derajat

<sup>33</sup> Arthaingan H.Mutia. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014” dalam Jurnal Vokasi Indonesia Vol 4. No.2 Juli-Desember 2016

<sup>34</sup> D. kartika, IC. Kusuma.” Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio Efisiensi PAD pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi” dalam Jurnal AKUNIDA ISSN 2442-3033 Vol 1. No.2 Desember 2015

	Warongan	serta Potensi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Minahasa Utara”	desentralisasi menunjukkan hasil masih rendah, efektivitas pajak daerah hasilnya sangat efektif, analisis varians secara umum dapat mengendalikan anggaran anggaran belanja. Tingkat efisiensi belanja dapat dikatakan efisien dan dilihat dari segi penerimaan pajak daerah dengan tingkat pertumbuhan untuk 5 tahun mendatang berpotensi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Minahasa Utara. <sup>35</sup>
7.	Yaneka Julastiana, I wayan Suartana	“Analisis Efisiensi dan efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung”	Hasil menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi tahun 2004-2011 Kabupaten Klungkung menunjukkan penerimaan yang efisien. Berdasarkan hasil efektivitasnya penerimaan pajak daerah dan retribusi tahun 2004-2011 Kabupaten Klungkung menunjukkan hasil yang sangat efektif <sup>36</sup> .
8.	Murni Dahlena, Junita Putri	Analisis Anggaran Pendapatan dan	Hasil penelitian menunjukkan sumber pendapatan dan belanja

---

<sup>35</sup> Nathania Ch. E. Sasuwuk, Jullie J. Sondakh, Jessy D. L. Warongan. “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Potensi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Minahasa Utara”

<sup>36</sup> Yaneka Julastiana, dkk. “Analisis Efisiensi dan efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung”

	Rajana	Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provisi di Sumatera Utara	kab/kota sumatera utara mengalami kenaikan tiap tahunnya dari tahun 2014 sampai 2017, komponen yang berasal dari dana bantuan mengalami penurunan dan kinerja keuangan tingkat kemandirian mengalami kenaikan yang signifikan di tiap tahunnya. <sup>37</sup>
9.	Mukhlis Arsyi Muto'I (2018)	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri	Hasil penelitian berdasarkan varian pendapatan secara umum dikatakan baik, analisis derajat desentralisasinya dapat dikatakan kurang, hasil rasio ketergantungan keuangan daerahnya dikatakan sangat kurang dan efektivitas PAD hasilnya sangat efektif, mengenai rasio kemandiriannya juga masih sangat tinggi. Hasil nalisis varians belanja secara umum baik, keserasian belanja secara umum dikatakan kurang serasi dan efisiensi belanja daerah dikatakan efisien. <sup>38</sup>
10.	Hariati Eka Putri (2017)	Analisis Rasio Kemampuan,	Hasil penelitian menunjukkan rata-rata rasio kemampuan

<sup>37</sup> Murni Dahlena, dkk. "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara" dalam *Jurnal of Economics, Business and Accounting* Vol 3. No.2 Juni 2020

<sup>38</sup> Mukhlis Arsyi Muto'i. "Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri" dalam artikel skripsi universitas Nusantara PGRI Kediri, 2018

		Kemandirian dan Pertumbuhan Keuangan Daerah	keuangan daerah masih tergolong kurang dan Trend kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru 2015-2020 menunjukkan trend yang positif. <sup>39</sup>
--	--	---	---

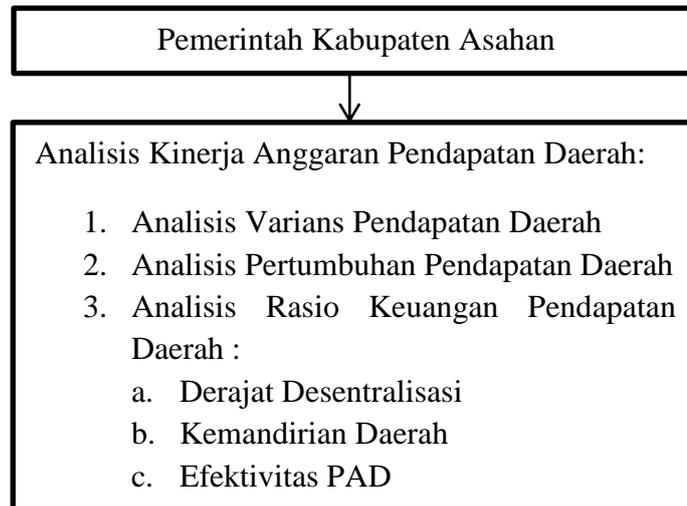
### C. Kerangka Pemikiran

Kinerja anggaran dapat diartikan sebagai gambaran umum atau kondisi keuangan suatu instansi dalam kurun waktu atau periode tertentu. Jika dihubungkan dengan sebuah instansi pemerintah daerah maka kinerja anggaran pendapatan menunjukkan realisasi pendapatan dalam pengguna anggaran yang menunjukkan seberapa efisiennya daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melihat keadaan dan masalah yang ada maka pengukuran kinerja anggaran dan realisasinya pada pemerintah kabupaten Asahan dapat dilakukan dengan mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis *trend* (pertumbuhan) dan analisis rasio.

Analisis kinerja anggaran pendapatan dan realisasinya dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah. Tingginya tingkat kemandirian daerah maka semakin baik juga kualitas pelayanan publiknya. Analisis kinerja anggaran pendapatan dapat dilihat berdasarkan laporan realisasi anggaran dan dapat dihitung dengan cara Analisis Varians Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, dan Analisis Rasio Keuangan yang meliputi Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas. Berikut gambar 2.1 mengenai kerangka pemikiran.

---

<sup>39</sup> Hariati Eka Putri. "Analisis Rasio Kemampuan, Kemandirian dan Pertumbuhan Keuangan Daerah" dalam Jurna JOM Fekon Vol.4 No.1 Februari 2017.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang ada dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat penjelas secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau pada objek penelitian.

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data yang dapat memberikan gambaran jelas atas objek yang diteliti, untuk kemudian diproses dan dianalisis untuk kemudian menarik kesimpulan.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

##### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dengan mengambil data dari kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) yang beralamatkan di Jalan Plamboyan Sibogat, Mekar Baru, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21211.

##### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan ada pada tabel sebagai berikut:

3.1 tabel waktu penelitian

No	Tanggal	Kegiatan
1.	7 februari 2021	Memberikan surat izin kampus ke badan KESBANG dan politik Kabupaten Asahan.
2.	8 februari 2021	Menerima surat perizinan badan KESBANG dan politik Kabupaten Asahan.
3.	9 februari 2021	Memberikan surat izin badan KESBANG dan politik Kabupaten Asahan dan kampus ke kantor BAPPENDA Asahan .

4.	10 februari 2021	Menerima surat perizinan dan meminta data yang dibutuhkan.
----	------------------------	--

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun subjek dan objek penelitian sebagai berikut:

#### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

#### 2. Objek penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Laporan keuangan berupa target APBD dan Realisasi Kabupaten Asahan tahun 2016-2019.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini ialah menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sumber data penelitian diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara.

#### 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder berupa laporan keuangan dari BAPPENDA asahan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada di tempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

Dalam observasi ini menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati objek kajian dokumen dengan menelaah dokumen yang ada pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan berupa Laporan Realisasi Anggaran dengan mengamati target APBD dan realisasinya selama tahun 2016-2019.

## 2. Dokumentasi

Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan . Adanya dokumentasi dalam penelitian ini lebih kepada pengumpulan data laporan keuangan dan data-data pendukung lainnya yang dibutuhkan.

## 3. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan pendapatan daerah secara lebih mendalam.

## **F. Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang di dasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni dengan konsep anggaran khususnya analisis pendapatan. Analisis kualitatif adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data yang dapat memberikan gambaran jelas atas objek yang diteliti untuk kemudian diproses dan dianalisis untuk kemudian menarik kesimpulan. Analisis keuangan pada laporan anggaran dilakukan dengan membandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada BAPPENDA Kabupaten Asahan.
2. Menghitung data dengan menggunakan analisis varians pendapatan daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, dan analisis rasio keuangan yang terdiri dari derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD.
3. Menginterpretasikan data yang telah dihitung dengan menggunakan analisis untuk menggambarkan suatu masalah yang terjadi pada instansi tersebut.
4. Menyimpulkan masalah yang terjadi dari hasil perhitungan analisis untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah yang terjadi pada instansi tersebut.

Adapun untuk mengetahui analisis kinerja pendapatan daerah dapat dihitung dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Adapun rumus untuk analisis varians pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Adapun rumus untuk menganalisis pertumbuhan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pend.Tahun } t - \text{Pend.Tahun } (t-1)}{\text{Pend.Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

### 3. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

Adapun rasio yang digunakan untuk menganalisis adalah sebagai berikut:

#### a. Derajat Desentralisasi

Adapun rumus untuk menganalisis derajat desentralisasi pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Tabel skala interval Derajat Desentralisasi Fiskal:

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0-10%	Sangat Kurang
10,1-20%	Kurang
20,1-30%	Cukup
30,1-40%	Sedang
40,1-50%	Baik
50>	Sangat Baik

*Sumber. Depdagri, 1991: 20*

#### b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Adapun rumus untuk menganalisis kemandirian keuangan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}}$$

Tabel Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif

Tinggi	>75-100	Delegatif <sup>40</sup>
--------	---------	-------------------------

c. Rasio Efektivitas PAD

Adapun rumus untuk menganalisis rasio efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel Efektivitas Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Kriteria.

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif <sup>41</sup>

<sup>40</sup> Arthaingan H.Mutiha. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014" dalam Jurnal Vokasi Indonesia vol.4 No.2 Juli- Desember 2016.

<sup>41</sup> Arfan Ikhsan dkk, *Akuntan Sektor Publik*, h. 305

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### 1. Gambaran Umum Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

###### a. Sejarah Ringkas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan atas perubahan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan nomor 6 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Asahan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Asahan diubah menjadi dua bagian yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Asahan merupakan instansi yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

###### b. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Asahan

###### 1. Tugas Pokok

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah melalui Sekretariat Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan sesuai peraturan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah.

## 2. Fungsi Pokok

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan, maka harus mengetahui fungsi pokok Badan Kepegawaian Daerah, yaitu :

- a) Pelaksanaan penyiapan penyusunan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan (protap) pemerintah.
- b) Pelaksanaan perencanaan pengembangan kepegawaian daerah.
- c) Pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan kepegawaian daerah.
- d) Pelaksanaan penyiapan kegiatan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Pelaksanaan penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- f) Pelaksanaan penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- g) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- h) Pelaksanaan urusan tata usaha di bidang kepegawaian.
- i) Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok dan melakukan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan kepala daerah.

c. Struktur Organisasi serta Uraian Tugas Fungsi Jabatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

Struktur organisasi merupakan kerangka yang mengelompokkan hubungan antar individu pada suatu organisasi. Setiap bagian dalam organisasi memiliki tanggung jawab dan tugas yang telah ditentukan. Struktur organisasi berfungsi untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan hubungan atau keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum instansi, diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam struktur organisasi instansi.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan kegiatan dapat diterapkan sehingga efisiensi dan aktivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan oleh perorangan maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dan mencakup tata hubungan secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Susunan Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah terdiri dari:

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat;
- 3) Sub Bagian;
- 4) Sub Bidang; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

- 1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.  
Bidang sebagaimana dimaksud terdiri dari:
  - a. Bidang Anggaran;
  - b. Bidang Perbendaharaan;
  - c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
  - d. Bidang Aset.
- 4) Masing – masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.  
Bidang Anggaran terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
  - b. Sub Bidang Belanja Langsung.  
Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Belanja Gaji dan
  - b. Sub Bidang Belanja Non Gaji.  
Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Akuntansi dan
  - b. Sub Bidang Pelaporan.  
Bidang Aset terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pencatatan, Pelaporan, dan Analisa Kebutuhan Barang Daerah; dan
  - b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.

Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

d. Perangkat Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten  
Asahan

Adapun perangkat kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten  
Asahan sebagai berikut:

Kepala Badan : Drs. H. Mahendra MM

Sekretaris : Drs. Saharuddin

Sub bidang umum/kepegawaian : Mukhlis, SH

Sub bidang keuangan : Dewi Tri Astuti

Sub bid perencanaan evaluasi & pelaporan : Bambang Ardiansyah, SE

Sub bidang penetapan : Dahron Siregar, SE

Sub bidang penagihan : Alpan Rezeki, A.Ma.Pd

Sub bidang pengendalian dan operasional : Hj. Yuliah, S.Sos

Sub bidang pendaftaran dan pendataan : Zulfikar Ali Harahap, SE

Sub bidang pendapatan dan penilaian : Heriani Sihombing, SE

Sub bidang penagihan pbb : Arnawin

Sub bidang pendaftaran dan pendataan pajak daerah lainnya : Rahmad Hidayat  
Dalimunthe, SH

Sub bidang pemeriksaan : Jhon FP sihombing

Sub bidang penagihan pajak daerah lainnya : Hendra Sinaga, SH

Sub bidang keberatan dan pertimbangan : Mhd. Ali Fahruzi, SH

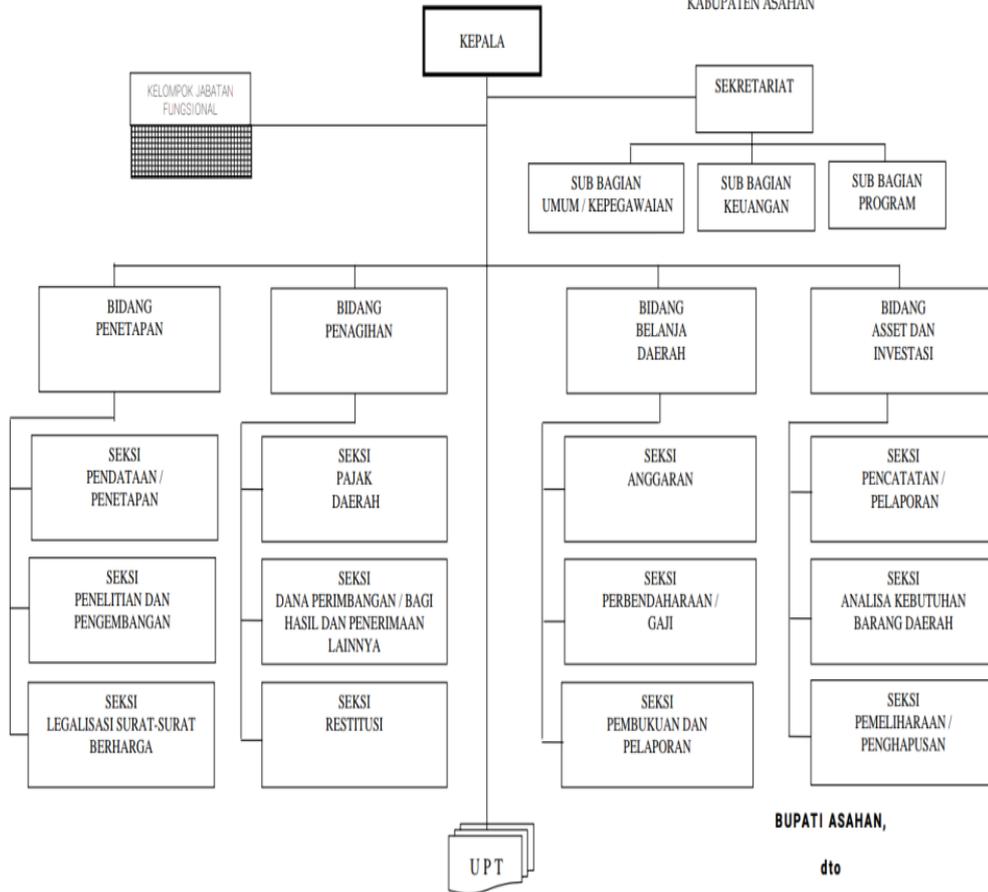
Sub bidang pengelolaan data dan informasi : Atmawati, SAG

Sub bidang legagasi surat-surat berharga : Hj. Juni Wijayati, BA

Sub bidang pembukuan dan pelaporan : Masriani Siagian, SH.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : XVI  
NOMOR : 6 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 APRIL 2008  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



D:\modul IT\Semester III\Asahan2008.pdf\LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI 2008.docx

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bappeda Asahan

## B. Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis varians pendapatan daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu penggunaan laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja keuangan pendapatan. Berikut ini tabel perhitungan Varians Pendapatan Daerah:

**Tabel 4.1 perhitungan Varians Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan tahun 2016-2019**

Tahun	APBD	Realisasi	Selisih	Persentase Realisasi APBD	Kriteria Kemampuan
2016	1,502,930,028,345	1,614,734,437,069	111,804,408,725	107,44%	Baik
2017	1,532,579,693,523	1,487.824,513,723	(44,755,125,801)	97,08%	Kurang Baik
2018	1,646,804,154,010	1,615,917,027,263	( 30,887,126,747)	98,12%	Kurang Baik
2019	1,814,345,640,848	1,724,265,273,793	(90,080,367,056)	95,04%	Kurang Baik

Analisis varians berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2016 selisih antara anggaran dan realisasi APBD sebesar 111,804,408,725 dengan persentase 107,44%, dalam hal ini hasil menunjukkan varians pendapatan daerah memiliki kriteria kemampuan yang baik. Pada tahun 2017 selisih antara anggaran dan realisasi APBD menurun sebesar -44,755,125,801 dengan persentase 97,08%, dalam hal ini hasil menunjukkan varians pendapatan daerah memiliki kriteria kemampuan yang kurang baik. Pada tahun 2018 selisih anggaran dan realisasi APBD hanya sebesar -30,887,126,747 dengan persentase 98,12%, dalam hal ini hasil menunjukkan varians pendapatan daerah memiliki kriteria kemampuan yang kurang baik. Pada tahun 2019 selisih anggaran dan realisasi APBD sebesar -90,080,367,056 dengan persentase 95,04%, dalam hal ini hasil menunjukkan varians pendapatan daerah memiliki kriteria kemampuan yang kurang baik.

## 2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

- a. Berikut ini hasil dari Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan pada Tahun 2016 :

**Tabel 4.2.1 Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan pada Tahun 2016**

Uraian	Realisasi 2015	Realisasi Anggaran 2016	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	98,279,308,428	119,498,541,230	21,219,232,802	21,60%
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	965,041,336,384	1,047,303,933,183	82,262,596,799	8,52%
Lain-lain Pendapatan yang sah	343,709,796,598	447,931,962,656	104,222,166,058	30,32%
Total Pertumbuhan Pendapatan	1,407,030,441,411	1,614,734,437,069	207,703,995,659	14,76%

Pada tabel di atas hasil analisis menunjukkan pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan sebesar 21,219,232,802 dengan persentase 21,60%, pendapatan transfer dana perimbangan sebesar 82,262,596,799 dengan persentase 8,52% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 104,222,166,058 dengan persentase 30,32%. Pada analisis pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan tahun 2016 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang positif karena hasil menunjukkan bahwa total pertumbuhan pendapatan di tahun tersebut sebesar 207,703,995,659 dengan persentase 14,76%.

- b. Berikut ini hasil dari Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan pada Tahun 2017 :

**Tabel 4.2.2 Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan pada Tahun 2017**

Uraian	Realisasi 2016	Realisasi Anggaran 2017	Pertumbuhan	Persentase pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	119,498,541,230	123,687,304,879	4.188,763,648	35,05%
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1,047,303,933,183	1,279,271,630,609	231,967,697,426	22,14%
Lain-lain Pendapatan yang sah	447,931,962,656	84,865,578,235	-363,066,384,421	-81,05%
Total Pertumbuhan Pendapatan	1,614,734,437,069	1,487.824,513,723	-126,909,923,347	-7,9%

Pada tabel di atas persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dana perimbangan masing-masing mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan pada pendapatan asli daerah sebesar 4.188,763,648 dengan persentase 35,05% dan pendapatan transfer dana perimbangan 231,967,697,426 dengan persentase 22,14%. Pada persentase pertumbuhan pada lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -363,066,384,421 dengan persentase -81,05%. Pada analisis pertumbuhan pendapatan Daerah Kabupaten Asahan tahun 2017 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang negatif karena hasil analisis menunjukkan bahwa total pertumbuhan pendapatan tahun tersebut sebesar -126,909,923,347 dengan persentase -7,9%.

- c. Berikut ini hasil dari Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan pada Tahun 2018 :

**Tabel 4.2.3 Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan pada Tahun 2018**

Uraian	Realisasi 2017	Realisasi Anggaran 2018	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	123,687,304,879	142,972,039,821	19,284,734,942	15,60%
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1,279,271,630,609	1,303,234,263,467	23,962,632,858	1,87%
Lain-lain Pendapatan yang sah	84,865,578,235	169,710,723,975	84,845,145,740	99,98%
Total Pertumbuhan Pendapatan	1,487.824,513,723	1,615,917,027,263	128,092,513,540	8,61%

Pada tabel di atas hasil analisis menunjukkan pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan sebesar 19,284,734,942 dengan persentase 15,60%, pendapatan transfer dana perimbangan sebesar 23,962,632,858 dengan persentase 1,87% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 84,845,145,740 dengan persentase 99,98%. Pada analisis pertumbuhan pendapatan Daerah Kabupaten Asahan tahun 2018 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang positif karena hasil analisis menunjukkan bahwa total pertumbuhan pendapatan tahun tersebut sebesar 128,092,513,540 dengan persentase 8,61%.

- d. Berikut ini hasil dari Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan pada Tahun 2019:

**Tabel 4.2.4 Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan pada Tahun 2019**

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi Anggaran 2019	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	142,972,039,8201	149,647,050,442	6,675,010,621	4,67%
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1,303,234,263,467	1,198,101,351,385	-105,132,912,082	-8,06%

Lain-lain Pendapatan yang sah	169,710,723,975	376,516,871,966	206,806,147,991	121,86%
Total Pertumbuhan Pendapatan	1,615,917,027,263	1,724,265,273,793	108,348,246,530	6,71%

Pada tabel di atas hasil analisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,675,010,621 dengan persentase 4,67%. Hasil pertumbuhan pada pendapatan transfer dana perimbangan mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -105,132,912,082 dengan persentase -8,06%, dan hasil pertumbuhan pada lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan positif sebesar 206,806,147,991 dengan persentase 121,86%. Pada analisis pertumbuhan pendapatan Daerah Kabupaten Asahan tahun 2019 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang positif karena hasil menunjukkan bahwa total pertumbuhan pendapatan tahun tersebut sebesar 108,348,246,530 dengan persentase 6,71%.

### 3. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

Adapun hasil dari analisis rasio keuangan pendapatan daerah ialah sebagai berikut:

#### a. Derajat Desentralisasi

Berikut hasil perhitungan derajat desentralisasi:

**Tabel 4.3 Rasio Keuangan Derajat Desentralisasi**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi	Kriteria Kemampuan
2016	119,498,541,230.48	1,614,734,437,069.48	7,40%	Sangat Kurang
2017	123,687,304,878.59	1,487.824,513,722.59	8,31%	Sangat Kurang
2018	142,972,039,820.99	1,615,917,027,263.00	8,84%	Sangat Kurang
2019	149,647,050,441.83	1,724,265,273,792.65	8,68%	Sangat Kurang

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Kabupaten Asahan tahun 2016-2019 secara umum menunjukkan hasil yang tidak diharapkan. Pada tahun 2016 hasil persentase derajat desentralisasi sebesar

7,40% dengan kriteria kemampuan rendah sekali. Pada tahun 2017 jumlah persentase sebesar 8,31% dengan kriteria kemampuan derajat desentralisasi rendah sekali. Pada tahun 2018 persentase sebesar 8,84% dengan kriteria kemampuan rendah sekali, dan di tahun 2019 jumlah persentase sebesar 8,68% dengan kriteria kemampuan rendah sekali. Derajat desentralisasi paling rendah terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 7,40% dan derajat desentralisasi tertinggi di tahun 2018 yaitu 8,84%, kemudian terjadi penurunan di tahun 2019 yaitu 8,68%. Berdasarkan skala interval kemampuan daerah menurut Tim Litbang Depdagri 1991 penilaian pada tahun 2016 sampai tahun 2019 menunjukkan kriteria kemampuan sangat kurang karena seluruh derajat desentralisasi di bawah 25%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu menyelenggarakan desentralisasi.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berikut ini merupakan tabel perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah :

**Tabel 4.4 Rasio Keuangan Kemandirian Daerah**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi & Pinjaman	Rasio Kemandirian	Kriteria Kemampuan
2016	119,498,541,230	1,047,303,933,183	11,41%	Rendah Sekali
2017	123,687,304,879	1,279,271,630,609	9,67%	Rendah Sekali
2018	142,972,039,821	1,303,234,263,467	10,97%	Rendah Sekali
2019	149,647,050,442	1,198,101,351,385	12,5%	Rendah Sekali

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 rasio kemandirian sebesar 11,41% dengan kriteria kemampuan rendah sekali. Pada tahun 2017 terjadi penurunan rasio sebesar 9,67% dengan kriteria kemampuan rendah sekali. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 10,97% dengan kriteria kemampuan rendah sekali. Pada tahun 2019 meningkat juga sebesar 12,5% dengan kriteria kemampuan rendah sekali. Rasio kemandirian daerah

terendah terjadi di tahun 2017 dan tertinggi di tahun 2019. Secara keseluruhan rasio kemandirian keuangan daerah mengalami kriteria kemampuan yang kurang baik.

c. Rasio Efektivitas PAD

Berikut ini merupakan tabel perhitungan Rasio Efektivitas PAD:

**Tabel 4.5 Rasio Keuangan Efektivitas PAD**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria Kemampuan
2016	119,498,541,230	104,918,290,356	113,90%	Sangat Efektif
2017	123,687,304,879	129,630,330,203	95,42%	Efektif
2018	142,972,039,821	149,520,487,113	95,62%	Efektif
2019	149,647,050,442	167,805,824,021	89,18%	Cukup Efektif

Pada tabel di atas hasil menunjukkan bahwa rasio efektivitas selama tahun 2016-2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 target PAD dianggarkan sebesar 104,918,290,356 dengan persentase 6,98% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2017 anggaran PAD meningkat menjadi 129,630,330,203 dengan persentase 8,46% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2018 PAD dianggarkan sebesar 149,520,487,113 dengan persentase 9,08% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2019 anggaran PAD kembali naik menjadi 167,805,824,021 dengan persentase 9,25% dari total anggaran pendapatan. Realisasi PAD Kabupaten Asahan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 anggaran PAD Kabupaten Asahan sebesar 119,498,541,230 dengan persentase sebesar 7,40 % dari total pendapatan. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 123,687,304,879 dengan persentase sebesar 8,31% dari total pendapatan. Pada tahun 2018 PAD mengalami kenaikan menjadi 142,972,039,821 dengan persentase 8,84% dari total pendapatan. Kemudian di tahun 2019 PAD Kabupaten Asahan meningkat menjadi 149,647,050,442 dengan persentase 8,68% dari total pendapatan. Berdasarkan total perhitungan pada tabel menunjukkan bahwa Efektivitas PAD Kabupaten

Asahan pada tahun 2016 sebesar 113,90% dengan kriteria kemampuan sangat efektif, tahun 2017 sebesar 95,42% dengan kriteria kemampuan efektif, tahun 2018 sebesar 95,62% dengan kriteria kemampuan efektif, dan di tahun 2019 sebesar 89,18% dengan kriteria kemampuan cukup efektif. Pada tahun 2016 rasio efektivitas PAD sebesar 113%, di tahun 2017 rasio mengalami penurunan sebesar 95,42%. Kemudian di tahun 2018 rasio efektivitas PAD sebesar 95,62% dan mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2019 sebesar 89,18%. Secara umum hasil efektivitas PAD menunjukkan hasil yang efektif.

### **C. PEMBAHASAN**

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Kabupaten Asahan selama periode 2016-2019 yang meliputi :

#### **1. Analisis Varians Pendapatan Daerah**

Berdasarkan hasil analisis varians pendapatan daerah menunjukkan bahwa rata-rata hasil dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan dan realisasi belum mencapai target anggaran. Namun dalam hal ini masih wajar karena hasil persentase tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan dan realisasi yang tercapai hampir mendekati target anggaran. Pada tahun 2016 persentase mencapai 107,44% melebihi dari target anggaran dan hal ini sangat baik. Pencapaian tersebut menggambarkan bahwa tahun 2016 kinerja anggaran pendapatan lebih baik/tinggi karena realisasi mencapai lebih dari 100% dari target yang telah dianggarkan dibandingkan tahun-tahun setelahnya yang realisasi pendapatannya belum mencapai 100% dari target yang dianggarkan.

Pada tahun 2017 hasil persentase varians mengalami penurunan sebesar 97,08%, hal ini dikarenakan realisasi retribusi daerah yang menurun dan lebih rendah daripada tahun sebelumnya tetapi di tahun 2018 persentase varians anggarannya meningkat kembali menjadi 98,12% dan hal ini baik. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dan hasil analisis pada tahun inilah yang paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini masih dapat dikatakan

wajar dikarenakan terjadinya defisit keuangan yang diakibatkan tidak tercapainya target sejumlah pos penerimaan pendapatan, salah satunya yaitu pendapatan pajak dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak pada saat itu.

Hasil analisis pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan secara umum menunjukkan bahwa Kinerja Pendapatan Daerah kurang baik, hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar tahun yang diteliti mengalami selisih kurang atau selisih yang tidak diharapkan dan realisasinya belum mencapai 100% dari target anggaran. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan memiliki kinerja anggaran yang baik apabila dapat memperoleh realisasi pendapatan yang melebihi jumlah target yang dianggarkan. Secara prinsipnya, anggaran pendapatan sendiri merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan dan harus dicapai oleh pemerintah daerah.

## **2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah**

Hasil Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan secara umum menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami pertumbuhan yang baik. Hal ini ditunjukkan di tahun 2016 total pertumbuhan pendapatan sebesar 14,76%, tahun 2017 total pertumbuhan pendapatan sebesar -7,9%, tahun 2018 total pertumbuhan pendapatan sebesar 8,61% %, dan tahun 2019 total pertumbuhan pendapatan sebesar 6,71%.

Pemerintah Kabupaten Asahan sudah baik dalam mengelola pertumbuhan pendapatan daerahnya walaupun tidak secara keseluruhan pertumbuhan mengalami pertumbuhan secara positif. Pada tahun 2017 pendapatan daerahnya mengalami pertumbuhan negatif tetapi untuk tahun-tahun berikutnya mengalami pertumbuhan yang positif, dalam hal ini juga pertumbuhannya masih cenderung tidak meningkat. Pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi di tahun 2016 dan tahun-tahun setelahnya mengalami penurunan, tetapi masih dapat dikatakan wajar karena hasil analisis masih bernilai positif.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah menunjukkan Kinerja Pendapatan yang baik apabila mengalami tingkat pertumbuhan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Kabupaten Asahan secara umum menunjukkan bahwa hasil analisis pertumbuhan pendapatan daerahnya baik karena cenderung mengalami pertumbuhan yang positif.

### **3. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah**

Berikut ini hasil analisis rasio keuangan daerah:

#### **a. Derajat Desentralisasi**

Pada hasil Analisis Derajat Desentralisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2016-2019 secara umum menunjukkan hasil yang tidak diharapkan. Pada tahun 2016 hasil sebesar 7,40%, tahun 2017 sebesar 8,31%, tahun 2018 sebesar 8,84%, dan di tahun 2019 sebesar 8,68%. Derajat desentralisasi paling rendah terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 7,40% dan derajat desentralisasi tertinggi di tahun 2018 yaitu 8,84% kemudian terjadi penurunan di tahun 2019 yaitu 8,86%.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Asahan masih belum baik dalam menjalankan desentralisasinya karena kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Asahan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki masih sangat rendah kemampuannya untuk penyelenggaraan desentralisasi dikarenakan kemampuan keuangan daerah mengenai hasil analisis rata-rata derajat desentralisasi masih di bawah 20%.

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Menurut artikel Menteri keuangan, jika Derajat Desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi tetapi jika kemampuan desentralisasi hanya dibawah 20% maka kriteria kemampuan keuangan daerahnya sangat kurang. Berdasarkan skala interval kemampuan daerah menurut Tim Litbang

Depdagri 1991 penilaian derajat desentralisasi Kabupaten Asahan sangat kurang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu menyelenggarakan desentralisasi. Derajat desentralisasi kedepannya harus semakin meningkat karena pemerintah pusat telah memberikan desentralisasi fiskal kepada berbagai daerah di Indonesia. Adapun tujuannya untuk meningkatkan keuangan daerah guna memperluas pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah tidak dapat dilaksanakan apabila tidak didukung oleh keuangan daerah yang memadai (cukup).

#### b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pada hasil analisis rasio kemandirian keuangan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan tahun 2016 sampai 2019 secara umum perhitungannya masih rendah sekali. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio tahun 2016 sebesar 11,41%, di tahun 2017 mengalami penurunan hasilnya hanya sebesar 9,67% dan ini hasil rasio terendah selama empat tahun penelitian, di tahun 2018 meningkat sebesar 10,97%, dan di tahun 2019 sebesar 12,5%. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah dalam hal ini menunjukkan bahwasannya sumber dari penerimaan daerah yang belum maksimal. Secara keseluruhan kinerja anggaran pendapatan Kabupaten Asahan dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat dikategorikan belum baik, hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis rasio kemandirian daerah yang masih rendah sekali.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Rasio kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, terutama pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, maka tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah dan provinsi) semakin rendah dan sebaliknya.

### c. Rasio Efektivitas PAD

Hasil analisis rasio efektivitas PAD pemerintah daerah kabupaten Asahan menunjukkan target PAD mengalami kenaikan dan juga penurunan setiap tahun. Pada tahun 2016 PAD dianggarkan sebesar 6,98% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2017 anggaran PAD meningkat menjadi 8,46% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2018 PAD dianggarkan sebesar 9,08% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2019 anggaran PAD kembali naik menjadi 9,25% dari total anggaran pendapatan. Realisasi PAD Kabupaten Asahan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 PAD Kabupaten Asahan sebesar 7,40 % dari total pendapatan. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu sebesar 8,31% dari total pendapatan. Pada tahun 2018 PAD mengalami kenaikan menjadi 8,84% dari total pendapatan, kemudian di tahun 2019 PAD Kabupaten Asahan meningkat menjadi 8,68% dari total pendapatan. Berdasarkan total perhitungan pada hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas PAD Kabupaten Asahan pada tahun 2016 sebesar 113,90%, tahun 2017 sebesar 95,42%, tahun 2018 sebesar 95,62%, dan di tahun 2019 sebesar 89,18%.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Asahan di tahun 2016 sudah sangat efektif dalam mengelola kinerja anggarannya dikarenakan tercapainya target anggaran dan nilai dari efektivitasnya di atas 100%. Pada 2017 dan 2018 pengelolaan kinerja anggaran masih efektif dan nilai dari efektivitasnya masih di berkisar 90-100%. Pada tahun 2019 kriteria kemampuan PAD hasilnya cukup efisien, hal ini dikarenakan masih kurang tercapainya realisasi terhadap target PAD nya, hal ini masih dapat dikatakan wajar karena persentase realisasi efektivitas PAD tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan dari target yang telah dianggarkan dan juga masih dalam kriteria kemampuan yang cukup efektif.

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan targetnya. Hasil perhitungan efektivitas PAD akan direkapitulasi dan diukur sesuai kriteria. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya

dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar satu atau seratus persen atau bahkan lebih. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Menurut hasil efektivitas secara umum analisis efektivitas PAD kabupaten Asahan menunjukkan hasil yang efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan yang telah dilakukan, maka dalam hal ini dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Berdasarkan hasil Kinerja Anggaran menggunakan Analisis Varians Pendapatan Daerah selama tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan secara umum kurang baik, hal ini dikarenakan tidak secara keseluruhan atau sebagian besar realisasi anggaran tidak mencapai target anggaran, hanya tahun 2016 yang mencapai target dan tahun 2017-2019 tidak.
2. Berdasarkan hasil Kinerja Anggaran menggunakan Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah selama tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan secara umum memiliki pertumbuhan yang baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar hasil analisis menunjukkan pertumbuhan yang positif dan hanya tahun 2017 yang bernilai negatif.
3. Berdasarkan hasil Kinerja Anggaran menggunakan Analisis Rasio Keuangan Derajat Desentralisasi Pendapatan Daerah selama tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan secara keseluruhan masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan hasil analisis memiliki kriteria kemampuan yang sangat kurang dan masih di bawah 20%. Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Asahan secara umum tahun 2016 -2019 perhitungannya masih rendah sekali. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan kriteria kemampuannya masih rendah sekali bahkan di bawah 25%. Kemudian berdasarkan Rasio Keuangan Efektivitas PAD Keuangan Daerah Kabupaten Asahan secara umum tahun 2016 -2019 perhitungannya efektif. Hal ini

dikarenakan sebagian besar tahun anggaran memiliki kriteria kemampuan yang efektif karena masih berada pada 90-100%.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan mengenai keterbatasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Asahan
  - a. Dari segi varians pendapatan berdasarkan empat tahun tersebut menunjukkan suatu fenomena bahwasannya angka yang ditunjukkan dari hasil perhitungan dapat menjadi suatu acuan untuk menyusun anggaran dan realisasinya agar lebih baik di periode kedepannya.
  - b. Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Asahan harus lebih meningkatkan lagi kinerja dalam mengelola pertumbuhan anggarannya tiap tahun agar tidak terjadi lagi pertumbuhan yang menunjukkan hasil negatif
  - c. Dengan melakukan suatu kinerja yang baik dalam mengelola anggaran, maka analisa secara rasio pendapatan daerah juga akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan suatu kinerja anggaran pendapatan agar optimalisasi sesuai dengan harapan yang diinginkan dan akan terwujud seperti visi dan juga misi BAPPENDA Kabupaten Asahan.
2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih teliti dalam menganalisa suatu kinerja keuangan pemerintah khususnya dalam kinerja anggaran pendapatan keuangan daerah. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan lebih banyak lagi teknik analisa dan berbagai perhitungan dengan rasio keuangan karena hal itu dapat menggambarkan keadaan keuangan daerah dengan sebenar-benarnya. Hal lain yang diharapkan untuk peneliti selanjutnya ialah menambah jangka waktu dalam mengobservasi lapangan sehingga penelitiannya

dapat lebih akurat, handal dan lebih baik daripada hasil dari penelitian penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardon Fridolin Honga, Ventje Ilat. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal EMBA, vol.2 No.4 Desember, 2014.
- Arni Asari, Ni Made, Ketut Alit. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada Belanja Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana vol.25.2 November, 2018.
- Arthaingan H.Mutiha. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014*. Jurnal Vokasi Indonesia vol.4 No.2 Juli- Desember 2016.
- Bahrin Assidiqi, Skripsi: *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*. Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Darise, Nurlan. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta : Indeks, 2010.
- Darise, Nurlan. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Indeks, 2009.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik , Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat, 2010.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Jakarta : Salemba Empat, 2012.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004.
- Hariati Eka Putri. *Analisis Rasio Kemampuan, Kemandirian dan Pertumbuhan Keuangan Daerah*. Jurnal JOM Fekon Vol.4 No.1 Februari, 2017.
- Haryanto. *perencanaan dan penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Semarang: Badan Penerbit, 2008.
- Ikhsan, Arfan. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Medan: Madenatera, 2018.
- Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

- Kartika, IC. Kusuma. *Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio Efisiensi PAD pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi* . Jurnal AKUNIDA ISSN 2442-3033 Vol 1. No.2 Desember, 2015.
- Komariyah, *Analisis Rasio Keuangan pada Anggaran dan Belanja Daerah untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kab Magelang*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* . Yogyakarta: UPP STM YKPN, ed. 2, 2010.
- M.I.P Nasution, N. Nurbaiti, N. Nurlaila, T.I.F Rahmah and K.Kamilah “Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah,” 2020 3<sup>rd</sup> International conference on computer and informatics engineering (IC2IE), 2020,pp. 48-51, doi: 10.1109/IC2IE50715.2020.9274654
- Mukhlis Arsyi Muto'i. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri*. artikel skripsi universitas Nusantara PGRI Kediri, 2018.
- Murni Dahlena, dkk. *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal of Economics, Business and Accounting Vol 3. No.2 Juni, 2020.
- Nathania Ch. E. Sasuwuk, Jullie J. Sondakh, Jessy D. L. Warongan. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Potensi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Minahasa Utara*.
- Nordiawan, Deddi. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat, 2010.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- Ramlah Basri. *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawes Utara*. Jurnal EMBA vol.1 No.4 Desember, 2013.
- Rani Febri, Elfreda Aplonia Lau, Suryatin . *Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda*. Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Sancoko, Bambang, et. al. *Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008.

Yaneka Julastiana. *Analisis Efisiensi dan efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung*.